



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

ANALISIS SIPD RI DALAM PENERBITAN SP2D ONLINE GAJI APARATUR SIPIL NEGARA DI BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Safina Putri Nandica¹, Junaidi¹

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya

*Email Corresponding: safinandc@gmail.com

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 10 Mei 2026

Revised date: 18 Agustus 2026

Accepted date: 25 September 2026

DOI:

<https://doi.org/10.33005/jdg.v16i2.5788>

This study aims to analyze the success of the Regional Government Information System of the Republic of Indonesia (SIPD RI) in supporting the issuance of Online SP2D for Civil Servant Salaries at the Regional Financial and Asset Management Agency of South Sumatra Province. The analysis applies the DeLone and McLean Information Systems Success Model (2003), which encompasses system quality, information quality, service quality, system use, user satisfaction, and net benefits. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that SIPD RI generally supports the issuance of Online SP2D effectively. System quality is adequate in terms of flexibility, speed, and ease of use, although system reliability is still affected by network and server conditions. The information provided is relevant and easy to understand; however, its completeness and personalization remain limited. Service quality is relatively good, although the resolution of technical issues is not always optimal. The system is consistently used according to operational needs, and users are generally satisfied with its convenience. The net benefits include time efficiency and faster salary disbursement through a more systematic and scheduled process.

Keyword: Information Systems Success Model, Regional Government Information System (SIPD), Fund Disbursement Order (SP2D)



*This article is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*

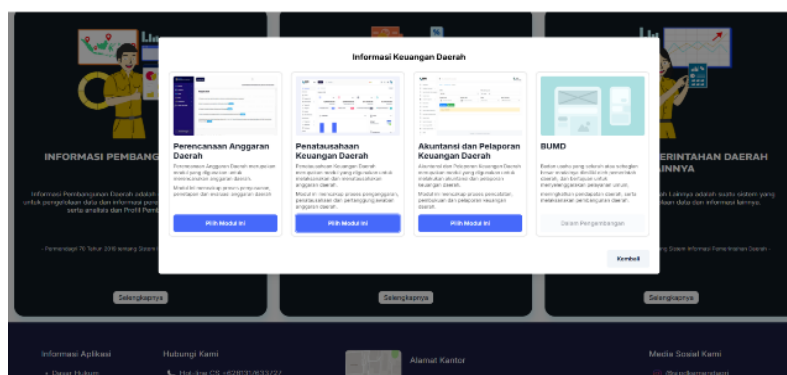
ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesuksesan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam mendukung penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Analisis menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003), yang mencakup kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD RI secara umum telah mendukung penerbitan SP2D Online Gaji ASN dengan baik. Kualitas sistem dinilai memadai dalam hal fleksibilitas, kecepatan, dan kemudahan penggunaan, meskipun keandalan sistem masih dipengaruhi oleh kondisi jaringan dan server. Informasi yang dihasilkan relevan dan mudah dipahami, tetapi kelengkapan dan personalisasi data masih terbatas. Kualitas layanan tergolong cukup baik, meskipun penyelesaian kendala teknis belum selalu optimal. Sistem digunakan secara konsisten sesuai kebutuhan operasional, dan pengguna umumnya merasa puas karena memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Manfaat bersih SIPD RI tercermin dalam efisiensi waktu dan percepatan proses pencairan gaji ASN melalui proses yang lebih sistematis dan terjadwal.

Kata Kunci: Model Kesuksesan Sistem Informasi, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi mendorong perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah dituntut untuk mengadopsi sistem berbasis digital guna mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan daerah menjadi instrumen penting untuk mendukung prinsip *good governance*, terutama dalam pengelolaan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan daerah. Pada tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri merilis pengembangan terbaru Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikenal sebagai SIPD RI, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 600.54/48/SJ tanggal 6 Januari 2023. Pada tahun anggaran yang sama, SIPD RI mulai diujicobakan dengan cakupan terbatas pada perencanaan dan penganggaran. Namun, mulai tahun anggaran 2024, seluruh pemerintah daerah diwajibkan mengoperasikan seluruh siklus pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan melalui SIPD RI, seiring dengan penghentian aplikasi SIMDA/FMIS oleh BPKP. Kebijakan ini menempatkan SIPD RI sebagai sistem utama pengelolaan keuangan daerah (Arif & Firmansyah, 2024). SIPD RI berfungsi sebagai platform terpadu berbasis teknologi informasi yang mendukung pengumpulan dan integrasi data secara daring dan *real time* antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga memudahkan evaluasi pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas (Dipua et al., 2020) dalam (Andriani et al., 2023). Sistem ini mencakup modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pelaporan.



Gambar 1. Tampilan Modul SIPD RI

Sumber: Dokumentasi Oleh Penulis (2025)

Pada modul penatausahaan, salah satu prosesnya adalah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2023). Sebagai penguatan transformasi digital, pada 17 April 2025 Kemendagri bersama ASBANDA meresmikan fitur SP2D *Online* dalam SIPD RI. Fitur ini bertujuan meningkatkan efisiensi, ketepatan, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengurangi kesalahan administrasi dan duplikasi data. Hingga saat ini, SP2D *Online* telah diimplementasikan oleh sejumlah pemerintah daerah dan menjadi bagian penting dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam mempercepat dan meningkatkan akurasi pencairan gaji ASN secara transparan dan terintegrasi. Fitur ini menjadikan SIPD RI sebagai fondasi penting dalam tata kelola keuangan daerah yang tidak hanya terintegrasi, tetapi juga berbasis data dan sistem yang dapat diandalkan, sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Hingga saat ini, terdapat 22 provinsi, 28 kabupaten, dan 16 kota yang siap menjalankan SP2D *Online* melalui SIPD RI (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan dan aset daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Untuk mendukung tugas tersebut, BPKAD mengadopsi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai sistem terpadu

pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan Operator Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, penerapan SIPD RI di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dimulai pada tahun 2023 dan masih terbatas pada perencanaan dan penganggaran, kemudian diperluas pada tahun 2024 hingga mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini difokuskan pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang berperan dalam pengelolaan kas daerah dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada tahun 2024, pencairan gaji ASN masih dilakukan secara manual meskipun SIPD RI telah digunakan, sehingga prosesnya memerlukan tahapan administrasi dan verifikasi pihak Bank Sumsel Babel (Wawancara dengan Operator Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2025).

Pada pencairan gaji tanggal 1 Mei 2025, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan mulai melaksanakan uji coba penerapan SP2D *Online* Gaji ASN melalui SIPD RI yang melibatkan lima SKPD, yaitu BPKAD, BAPPEDA, BAPENDA, BKD, dan Dinas Perhubungan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa seluruh tahapan, mulai dari pengajuan SPM hingga penerbitan SP2D *Online*, dapat berjalan lancar dengan akurasi data yang baik dan transfer dana dilakukan secara otomatis tanpa kendala teknis. Operator Bidang Perbendaharaan menilai sistem SIPD RI mudah digunakan dan responsif. Untuk memastikan konsistensi kinerja sistem, uji coba kembali dilakukan pada pencairan gaji tanggal 1 Juni 2025. Setelah dinilai stabil dan efektif, penerapan SP2D *Online* Gaji ASN melalui SIPD RI diperluas pada pencairan gaji tanggal 1 Juli 2025 kepada 44 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Melalui mekanisme ini, pencairan gaji ASN dilakukan secara terintegrasi melalui SIPD RI, meskipun pada tahap awal masih terbatas pada gaji induk. Perbedaan utama terletak pada proses transfer dana yang dilakukan secara langsung ke rekening penerima tanpa memerlukan otorisasi manual dari Bank Sumsel Babel, yang selanjutnya hanya berperan sebagai pelaksana transfer berdasarkan perintah sistem SIPD RI, sehingga proses pencairan menjadi lebih cepat dan efisien (Wawancara dengan Operator Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2025).

Penerbitan SP2D *Online* Gaji ASN melalui SIPD RI di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan saat ini baru dapat dilakukan secara otomatis bagi ASN yang memiliki rekening Bank Sumsel Babel. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan integrasi SIPD RI dengan perbankan lain. Selain itu, SIPD RI hanya mampu memproses gaji induk, yaitu gaji PNS dan P3K, sementara jenis pembayaran lain seperti gaji terusan, kekurangan gaji, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum dapat diproses melalui fitur yang sama dan masih harus menggunakan metode LS Barang dan Jasa yang memerlukan verifikasi akhir oleh Bank Sumsel Babel (Wawancara dengan Operator Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2025).

Hasil pra wawancara bersama dengan operator Bidang Perbendaharaan mengungkapkan bahwasannya terdapat sejumlah kendala dalam penerapan SP2D *Online*. Pertama, keterbatasan akses dan respons sistem, terutama saat terjadi gangguan jaringan, sementara penanganan dari tim pusat Kemendagri dinilai belum optimal dikarenakan jumlah tim teknis pusat belum banyak. Ketergantungan penuh pada pengelolaan sistem oleh pusat menyebabkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan perbaikan, sehingga proses kerja kerap terhambat. Kedua, ketidaksesuaian data rekening pegawai, baik akibat rekening baru yang belum terdaftar di Bank Sumsel Babel maupun perubahan rekening yang belum divalidasi oleh Bank Sumsel Babel sehingga menyebabkan proses transfer tertunda. Ketiga, kesalahan input ID Billing oleh bendahara OPD mengakibatkan kegagalan pemrosesan pajak dan menghambat pencairan gaji. Keempat, gangguan aplikasi perpajakan Kementerian Keuangan yang dapat menimbulkan ketidaksinkronan antara SIPD RI dan web dashboard Bank Sumsel Babel, sehingga beberapa SP2D tercatat gagal di SIPD RI meskipun dana telah ditransfer, yang berpotensi menimbulkan ketidaktepatan pencatatan realisasi keuangan daerah. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan SP2D *Online* Gaji ASN melalui SIPD RI belum sepenuhnya berjalan optimal. Tantangan muncul dari ketergantungan pada pengelolaan pusat, kesalahan pengguna dalam menginput data, serta kurangnya pelaporan pembaharuan data yang dilakukan OPD kepada Bank Sumsel Babel. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Junaidi, Rizky Ghoffar Ismail, Dwi Mirani, 2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem atau program,

tetapi sangat dipengaruhi oleh kinerja implementasi dan faktor lingkungan kebijakan, seperti keterlibatan aktor, karakteristik kelembagaan, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Dalam konteks ini, kendala teknis, ketergantungan pada pengelolaan pusat, serta lemahnya pelaporan pembaharuan data kepada pihak Bank Sumsel Babel menunjukkan bahwa penerapan SP2D *Online* Gaji ASN melalui SIPD RI belum sepenuhnya didukung oleh lingkungan implementasi yang optimal. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut guna menilai kesuksesan SIPD RI dalam mendukung penerbitan SP2D *Online* Gaji ASN di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dapat dipetakan ke dalam tiga fokus utama, yaitu efektivitas, implementasi, dan sistem informasi berbasis model kesuksesan DeLone dan McLean (2003). Penelitian yang menilai efektivitas menunjukkan bahwa SIPD relatif mampu mencapai tujuannya, namun masih terkendala faktor teknis. Penelitian yang dilakukan oleh (Manoe et al., 2023) di Kabupaten Sikka menilai penerapan SIPD bidang anggaran efektif dengan skor total 76,8%, sementara penelitian yang dilakukan oleh (Chinda Aqhni Adisi & Abdul Sadad, 2022) di Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan program SIPD cukup efektif meskipun masih menghadapi kendala jaringan dan keterbatasan fitur.

Penelitian yang membahas implementasi kebijakan SIPD menyoroti faktor organisasi, sumber daya, komunikasi, serta dukungan teknis. Penelitian yang dilakukan oleh (Fauzan Alfarishi & Hartati, 2024) di Kota Palembang menemukan penerapan SIPD berjalan cukup baik karena didukung monitoring, regulasi, dan pelatihan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Andriani et al., 2023) di Raja Ampat menemukan hambatan berupa server yang lemah dan minimnya pelatihan.

Penelitian yang mengkaji SIPD dari perspektif model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean lebih menekankan kesuksesan sistem informasi yang dilihat berdasarkan dimensi kualitas sistem, informasi, layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Penelitian yang dilakukan oleh (Kumalasari & Fanida, 2024) di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dapat dikatakan cukup baik dan efektif. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan, yaitu sistem belum sepenuhnya dapat diandalkan karena sering mengalami kendala dan error selama proses penganggaran. Selain itu, kinerja server yang belum optimal juga menjadi hambatan yang mengganggu kelancaran aktivitas pengguna dan waktu respons dari sistem yang masih belum memuaskan. Penelitian yang dilakukan oleh (Candra, 2024) menilai SIPD di Provinsi Sumatera Barat memiliki skor keberhasilan 69,77%, meskipun kualitas sistem menjadi aspek terendah. Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi et al., 2024) di Gianyar dan penelitian yang dilakukan oleh (Moh. Bayu Naufal Ghinaldi, 2025) di Dompu menekankan bahwa optimalisasi SIPD belum tercapai karena kendala teknis dan meningkatnya beban kerja. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Rafli et al., 2023) di Malang menyimpulkan SIPD membantu penatausahaan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Hukmi & Rahayu, 2023) di Sawahlunto menunjukkan bahwa kualitas informasi dan layanan lebih berpengaruh pada kepuasan dan manfaat bersih dibandingkan kualitas sistem.

Berdasarkan pemetaan tersebut terdapat kesenjangan penelitian (*gap research*). Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada efektivitas umum, implementasi kebijakan, atau optimalisasi kualitas laporan keuangan, sedangkan kajian yang secara khusus menilai kesuksesan sistem informasi dari DeLone & McLean (2003) pada SIPD RI dalam penerbitan SP2D *Online* Gaji ASN masih jarang dilakukan, terutama pada konteks BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Padahal itu sangat penting karena berkaitan langsung dengan pencairan gaji pegawai yang menyangkut hak ASN dan keberlangsungan birokrasi. Dengan demikian, untuk menganalisis kesuksesan penerapan suatu sistem informasi, salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003). Model ini mencakup enam dimensi utama, yaitu: Kualitas Sistem (*System Quality*), Kualitas Informasi (*Information Quality*), Kualitas Layanan (*Service Quality*), Penggunaan Sistem (*User*), Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*), serta Manfaat Bersih (*Net Benefits*) dari sistem informasi. Model ini relevan dalam menilai sistem informasi berbasis teknologi di sektor publik, termasuk sistem keuangan pemerintah seperti SIPD RI.

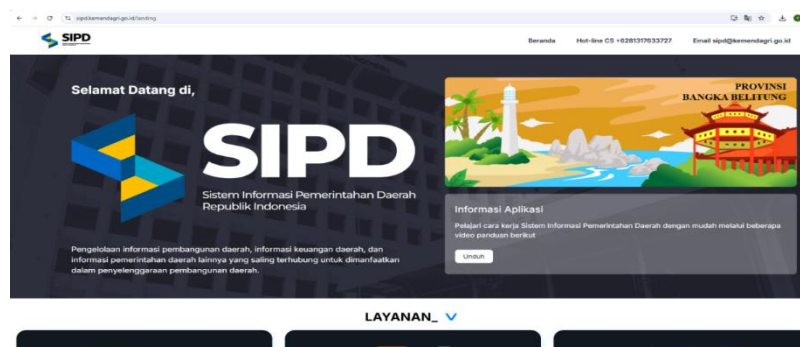
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri atas informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci adalah Kepala Subbidang Perbendaharaan II BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Informan utama meliputi satu pengguna awal dari OPD dan tiga operator verifikasi pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, informan pendukung terdiri atas satu informan internal dari Tim IT BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan satu informan eksternal dari Bank Sumsel Babel. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung serta pemahaman mendalam terhadap penerapan SP2D *Online* Gaji ASN melalui SIPD RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualitas Sistem (*System Quality*)

Kualitas sistem menggambarkan mutu teknis dari suatu sistem informasi, yaitu sejauh mana sistem tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Dengan kata lain, kualitas sistem mencerminkan atribut-atribut yang harus dimiliki sebuah sistem informasi agar mampu berfungsi secara optimal dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Semakin baik kualitas sistem, semakin besar pula kemampuannya dalam mendukung proses kerja, memberikan kemudahan, serta memastikan informasi yang dihasilkan cepat, dan dapat diandalkan. Aspek kualitas sistem seperti fleksibilitas, ketersediaan sistem & fitur, keandalan sistem, kecepatan sistem, kenyamanan dan kemudahan pengguna (DeLone & McLean, 2003). Sistem SIPD RI menunjukkan kualitas yang relatif baik dalam mendukung proses pengelolaan dan pencairan gaji ASN, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan. Dari sisi fleksibilitas, SIPD RI memungkinkan pengguna mengakses sistem secara daring dari berbagai lokasi dan perangkat, sehingga pekerjaan dapat tetap berjalan tanpa terikat ruang dan waktu. Misalnya, pencairan gaji dapat dijadwalkan sebelum tanggal 1 jika bertepatan dengan hari libur, dan sistem secara otomatis mengeksekusi transfer gaji pada tanggal 1 bertepatan dengan hari libur tersebut sesuai jadwal yang sudah dibuat sebelumnya. Mekanisme ini mencerminkan fleksibilitas dan keandalan sistem yang baik, sejalan dengan (Nelson et al., 2005) dan (DeLone & McLean, 2003) yang menekankan pentingnya ketersediaan dan adaptabilitas sistem untuk kelancaran proses kerja.



Gambar 2. Tampilan Website SIPD RI

Sumber: Dokumentasi Oleh Penulis (2025)

Namun demikian, SIPD RI belum sepenuhnya diimbangi dengan kelengkapan fitur yang tersedia. SIPD RI pada dasarnya telah mendukung penerbitan SP2D *Online* gaji induk ASN melalui penggunaan template LS Gaji. Akan tetapi, untuk jenis pembayaran lainnya, seperti gaji terusan, kekurangan gaji, dan TPP, proses masih memerlukan tahapan verifikasi tambahan di luar sistem karena menggunakan template LS Barang dan Jasa dalam SIPD RI.

[illegible]

Gambar 3. Tampilan LS gaji PNS & P3K di SIPD RI
Sumber: Dokumentasi Oleh Penulis (2025)

[illegible]

Gambar 4. Tampilan LS Barang dan Jasa Gaji Terusan di SIPD RI
Sumber: Dokumentasi Oleh Penulis (2025)

Aspek selanjutnya, keandalan sistem masih perlu ditingkatkan karena performa SIPD RI sangat dipengaruhi oleh kualitas jaringan pada masing-masing OPD saat proses input data berlangsung. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Kumalasari & Fanida, 2024) yang menunjukkan bahwa SIPD pada proses penganggaran masih sering mengalami gangguan, error, dan server down. Konsistensi temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian (Septiani & Isnawaty, 2025) yang menemukan bahwa keandalan SIPD cenderung menurun pada periode penggunaan tinggi, seperti akhir bulan dan akhir tahun. Dalam konteks penelitian ini, gangguan sistem paling sering terjadi pada tahap verifikasi sehingga menyebabkan keterlambatan pemrosesan kebutuhan mendesak, termasuk Ganti Uang (GU) ketika dana persediaan mulai menipis.

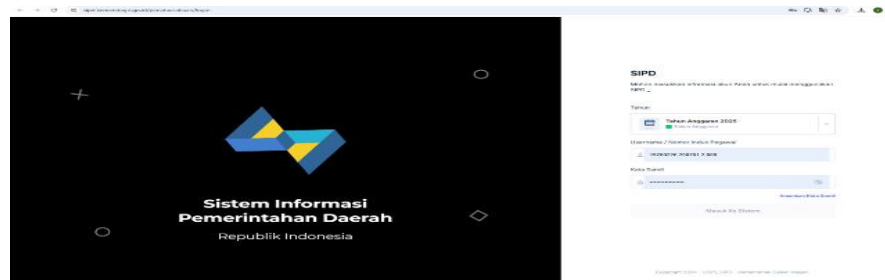
Aspek kecepatan sistem, sebagian besar pengguna menilai SIPD RI merespons perintah dengan cepat, terutama dalam pembuatan, verifikasi, dan pencetakan SP2D. Meski demikian, kecepatan tetap bergantung pada stabilitas jaringan, sehingga dalam kondisi tertentu proses dapat tertunda. Sementara itu, kemudahan penggunaan sistem tergolong tinggi, dengan alur kerja terstruktur, tampilan menu jelas, dan fitur yang mudah dipahami, sehingga pengguna dapat menjalankan tugas tanpa kendala.

2. Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Menurut DeLone dan McLean (2003), kualitas informasi diartikan sebagai karakteristik yang diharapkan dari hasil keluran (*output*) suatu sistem informasi. Dimensi ini berfokus pada kualitas informasi yang dihasilkan sistem dan kegunaannya bagi pengguna. Aspek kualitas Informasi seperti kelengkapan informasi, kemudahan pemahaman, personalisasi informasi, informasi yang sesuai, dan keamanan. Aspek kelengkapan informasi, SIPD RI pada dasarnya telah menyediakan data yang cukup rinci untuk mendukung proses pengelolaan dan penerbitan SP2D *Online* Gaji ASN. Hal ini sejalan dengan pandangan (Nelson et al., 2005) yang menekankan bahwa informasi dikatakan lengkap apabila mampu memenuhi kebutuhan pengguna

dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwasannya aspek kelengkapan masih perlu ditingkatkan karena sangat dipengaruhi oleh akurasi data OPD serta kualitas jaringan OPD saat proses input berlangsung. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Moh. Bayu Naufal Ghinaldi, 2025) yang juga menemukan bahwa kualitas informasi SIPD, khususnya pada aspek kelengkapan, belum sepenuhnya optimal. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada faktor penyebab yang mendasari permasalahan tersebut, menurut penelitian (Moh. Bayu Naufal Ghinaldi, 2025) menekankan bahwa ketidaklengkapan informasi disebabkan oleh keterbatasan fitur dan error sistem, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan kelengkapan informasi lebih banyak dipengaruhi oleh akurasi input data OPD serta kualitas jaringan OPD saat proses input berlangsung. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan kualitas informasi SIPD RI dapat bersumber baik dari aspek teknis sistem maupun dari kualitas data yang diinput oleh pengguna. Kemudian, aspek kemudahan pemahaman, informasi dalam SIPD RI dinilai cukup mudah dipahami oleh pengguna. Tampilan visual, istilah, dan struktur menu yang jelas membantu operator dalam menjalankan tugas, sejalan dengan penelitian oleh (Fogwill & Manataki, 2024) yang menekankan bahwa informasi berkualitas harus relevan dan mudah ditafsirkan. Namun, ketiadaan pesan kesalahan (*error message*) yang informatif masih menjadi kelemahan, karena menyulitkan pengguna memastikan kesuksesan input data, khususnya pada pengisian ID Billing di menu SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang tidak dilengkapi tombol simpan.

Pada aspek personalisasi informasi, SIPD RI belum sepenuhnya mampu menyesuaikan sajian informasi dengan kebutuhan pengguna, terutama untuk pelaporan realisasi anggaran. Keterbatasan fleksibilitas tampilan data menyebabkan operator harus melakukan rekapitulasi manual, yang menunjukkan bahwa kemampuan personalisasi informasi dalam sistem masih terbatas. Selanjutnya, pada aspek informasi yang sesuai, SIPD RI umumnya telah menyajikan informasi yang relevan untuk mendukung verifikasi SPM, penerbitan SP2D, dan pencairan gaji ASN. Namun, relevansi informasi sangat bergantung pada kualitas data dari OPD, karena ketidaksesuaian data dapat menghambat jalannya transaksi.



Gambar 5. Tampilan Halaman Login SIPD RI

Sumber: Dokumentasi Oleh Penulis (2025)

Dari sisi keamanan, SIPD RI dinilai baik karena menerapkan pembagian akun dan hak akses sesuai tugas dan fungsi pengguna. Pembatasan ini melindungi data dan meminimalkan risiko penyalahgunaan, sejalan dengan konsep perlindungan kerahasiaan data dalam sistem informasi (Gilbert et al., 2004). Dapat disimpulkan kualitas informasi SIPD RI dalam penerbitan SP2D *Online* Gaji ASN tergolong baik, terutama pada aspek kemudahan pemahaman, relevansi, dan keamanan. Namun, keterbatasan personalisasi informasi terkait belum bisa mendukung kebutuhan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dalam hal laporan realisasi anggaran yang masih dilakukan manual, kelengkapan data yang masih dipengaruhi oleh masing-masing OPD, belum ada notifikasi kesalahan menunjukkan perlunya penyempurnaan sistem agar lebih efektif mendukung kebutuhan pengguna.

3. Kualitas Layanan (*Service Quality*)

Menurut DeLone & McLean (2003), kualitas layanan tidak hanya menilai kualitas sistem itu sendiri, tetapi juga mencakup sejauh mana pengembang atau pengelola sistem berperan dalam membantu pengguna mengatasi kendala yang muncul. Dengan kata lain, kualitas layanan melibatkan dukungan aktif dari pihak

pengelola sistem untuk memastikan pengguna dapat menggunakan sistem secara efektif dan lancar. Aspek kualitas layanan seperti kompetensi pengelola sistem, kepedulian terhadap pengguna, kecepatan tanggapan. Pada dimensi kualitas layanan, analisis difokuskan pada kompetensi pengelola sistem, kepedulian terhadap pengguna, dan kecepatan tanggapan. Menurut (Pitt et al., 1995) kualitas layanan sistem informasi ditentukan oleh kemampuan pengelola dalam memberikan dukungan teknis, menunjukkan kepedulian, serta merespons kendala pengguna secara tepat waktu. Dari aspek kompetensi pengelola sistem, temuan menunjukkan bahwa pengelolaan teknis SIPD RI sepenuhnya dilakukan oleh tim pusat Kemendagri, sementara pemerintah daerah berperan sebagai pengguna (*user*). Operator daerah tidak memiliki otoritas untuk melakukan perbaikan atau pengembangan sistem, melainkan menyampaikan kendala melalui BPKAD Provinsi Sumatera Selatan untuk diteruskan ke tim pusat Kemendagri. Meskipun demikian, kemampuan teknis pengelola sistem di tingkat pusat dinilai memadai dalam melakukan perbaikan dan menjaga stabilitas operasional SIPD RI. Namun, terlihat pada aspek kepedulian terhadap pengguna, respons dari pusat tidak selalu cepat karena tingginya volume laporan dari seluruh Indonesia dan keterbatasan jumlah tim teknis. Mekanisme pelaporan berjenjang melalui Tim IT BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan efektif, dan koordinasi melalui pimpinan, khususnya Kabid Perbendaharaan, terbukti dapat mempercepat penanganan kendala. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepedulian pengelola sistem tergolong cukup baik, meskipun masih dibatasi oleh kapasitas sumber daya pusat.

Pada aspek kecepatan tanggapan, respons pengelola SIPD RI umumnya membutuhkan waktu sekitar 1–3 hari sejak laporan disampaikan. Pengguna memahami keterbatasan tersebut, namun menilai bahwa kecepatan respons masih belum optimal, terutama ketika kendala berdampak langsung pada proses pencairan gaji. Respons dapat menjadi lebih cepat apabila koordinasi dilakukan langsung oleh pimpinan ke pihak pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan tanggapan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas tim teknis pusat agar layanan SIPD RI lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Dapat disimpulkan, kualitas layanan SIPD RI dinilai cukup baik, ditunjukkan oleh kompetensi pengelola sistem yang memadai serta adanya mekanisme dukungan yang jelas. Namun, aspek kecepatan tanggapan masih menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki untuk memastikan kelancaran operasional SP2D *Online* Gaji ASN di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

4. Penggunaan Sistem (*User*)

Menurut DeLone dan McLean (2003), penggunaan sistem atau *intention to use* merupakan salah satu dimensi penting dalam mengukur kesuksesan sebuah sistem informasi. Dimensi ini menggambarkan sejauh mana pengguna benar-benar berniat memanfaatkan sistem sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aspek penggunaan sistem seperti tujuan penggunaan sistem, kemudahan penggunaan, frekuensi akses sistem dan jumlah transaksi di sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD RI dalam penerbitan SP2D *Online* gaji ASN di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah selaras dengan tujuan utama sistem. SIPD RI dimanfaatkan secara rutin oleh seluruh OPD, khususnya untuk proses pengajuan SPP, SPM, untuk penerbitan SP2D *Online* gaji induk ASN setiap akhir bulan. Pola penggunaan ini mencerminkan bahwa sistem telah menjadi bagian penting dalam alur kerja pengelolaan gaji, sebagaimana dikemukakan DeLone dan McLean (2003) bahwa penggunaan sistem yang konsisten dan berulang menunjukkan kesesuaian antara fungsi sistem dan kebutuhan organisasi. Namun, pemanfaatan SIPD RI masih terbatas pada jenis transaksi tertentu, karena pembayaran TPP, gaji terusan, dan kekurangan gaji masih memerlukan proses verifikasi manual di luar sistem yaitu masih dari pihak Bank Sumsel Babel yang melakukan input manual untuk OPD tersebut sehingga tujuan integrasi sistem belum sepenuhnya tercapai.

Aspek kemudahan penggunaan, SIPD RI dinilai sangat mendukung pelaksanaan tugas pengguna. Alur kerja yang jelas, tampilan antarmuka yang sederhana, serta menu yang mudah dipahami memungkinkan operator menjalankan proses input maupun verifikasi. Temuan ini sejalan dengan DeLone dan McLean (2003) yang menegaskan bahwa sistem yang mudah digunakan akan meningkatkan intensitas penggunaan dan mengurangi ketergantungan terhadap pendampingan teknis. Kemudahan tersebut turut memperkuat penerimaan pengguna terhadap SIPD RI dalam proses operasional sehari-hari. Frekuensi akses sistem

menunjukkan pola penggunaan yang tinggi dan konsisten, terutama pada periode akhir dan awal bulan yang berkaitan langsung dengan siklus penggajian ASN. Intensitas akses yang meningkat menjelang tanggal pencairan gaji mengindikasikan bahwa SIPD RI benar-benar digunakan sesuai kebutuhan kerja, bukan sekadar formalitas penerapan kebijakan. Temuan penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nuryana, 2025) yang mengungkapkan Kebijakan SDI sangat bermanfaat dan relevan. Ketersediaan data di portal SDI sangat membantu ketika melakukan penelitian ilmiah masyarakat Bangka Belitung yang memanfaatkan layanan data secara *online*, dengan proporsi terbesar digunakan untuk keperluan pemerintahan (45,24%) dan tugas sekolah atau kuliah (32,14%), dengan mayoritas data digunakan oleh PNS, TNI, Polri, serta pelajar dan mahasiswa. Hal ini memperkuat konsep DeLone dan McLean (2003) bahwa tingkat penggunaan sistem mencerminkan relevansi sistem terhadap proses yang dijalankan.

Aspek jumlah transaksi yang diproses melalui SIPD RI tergolong tinggi, khususnya untuk gaji induk seluruh OPD. Sistem dinilai mampu menangani beban transaksi besar tanpa hambatan signifikan selama tidak terjadi gangguan server. Kendala yang muncul umumnya bersumber dari kesalahan input data oleh OPD, bukan dari keterbatasan sistem itu sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa SIPD RI memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk mendukung volume transaksi yang tinggi untuk 44 OPD rutin setiap bulan tanggal 1, sebagaimana penggunaan sistem dalam model DeLone dan McLean (2003) juga mencerminkan keandalan sistem dalam mendukung aktivitas operasional. Dapat disimpulkan bahwa dimensi penggunaan sistem menunjukkan bahwa SIPD RI telah digunakan secara aktif, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan operasional dalam penerbitan SP2D *Online* gaji ASN. Meskipun demikian, keterbatasan cakupan transaksi yang masih memerlukan proses manual menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut agar penggunaan SIPD RI dapat sepenuhnya terintegrasi dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh proses penggajian ASN.

5. Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

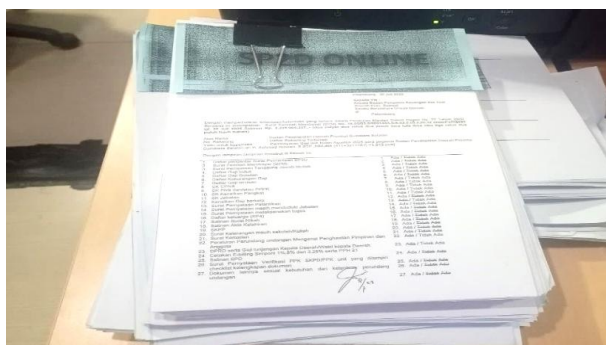
Menurut DeLone dan McLean (2003), kepuasan pengguna merupakan salah satu dimensi penting dalam menilai keberhasilan suatu sistem informasi. Kepuasan pengguna mencerminkan persepsi, dan umpan balik yang muncul setelah pengguna berinteraksi dengan sistem. Aspek kepuasan pengguna yaitu kecenderungan penggunaan berulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan penggunaan berulang SIPD RI pada layanan penerbitan SP2D *Online* gaji ASN berada pada tingkat yang tinggi. SIPD RI digunakan secara konsisten oleh pengguna karena telah menjadi sistem utama dalam proses pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengajuan hingga pencairan gaji ASN. Kemudahan sistem dalam menarik data secara otomatis dan meminimalkan proses manual mendorong pengguna untuk terus memanfaatkan SIPD RI dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan DeLone dan McLean (2003) yang menyatakan bahwa kepuasan pengguna tercermin dari intensitas penggunaan sistem secara berulang. Selain faktor kemudahan, kecenderungan penggunaan berulang SIPD RI juga dipengaruhi oleh penerapan sistem yang bersifat wajib berdasarkan regulasi Kemendagri. Amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.54/48/SJ Tahun 2023 menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah harus terintegrasi melalui SIPD RI. Kondisi ini menyebabkan penggunaan SIPD RI tidak hanya didorong oleh preferensi pengguna, tetapi juga oleh tuntutan kebijakan nasional dalam mendukung digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Dengan demikian, penggunaan berulang SIPD RI mencerminkan kombinasi antara kepatuhan regulatif dan kebutuhan operasional organisasi.

Meskipun digunakan secara berkelanjutan, beberapa informan mengemukakan adanya kendala teknis yang masih memengaruhi kenyamanan penggunaan, seperti potensi kesalahan input data dari OPD, performa sistem yang terkadang lambat, serta waktu respons perbaikan dari pengelola sistem pusat yang belum optimal. Kendala tersebut dapat menambah beban kerja dan memperlambat proses, terutama pada periode menjelang pencairan gaji. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi kecenderungan pengguna untuk tetap menggunakan SIPD RI, karena sistem ini dinilai memberikan manfaat utama berupa percepatan pencairan gaji dan integrasi proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dapat disimpulkan, kecenderungan penggunaan berulang SIPD RI menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna tergolong cukup baik.

Pengguna tetap mengandalkan SIPD RI sebagai sarana utama penerbitan SP2D *Online* gaji ASN meskipun masih terdapat beberapa kendala. Hal ini menguatkan pandangan DeLone dan McLean (2003) bahwa penggunaan berulang tidak hanya dipengaruhi oleh kepuasan absolut, tetapi juga oleh persepsi manfaat sistem dan perannya yang strategis dalam mendukung proses pencairan gaji ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara terjadwal dan terintegrasi.

6. Manfaat Bersih (*Net Benefit*)

Menurut DeLone dan McLean (2003), manfaat bersih merupakan hasil akhir berupa dampak positif, dampak negatif atau nilai tambah yang dirasakan pengguna maupun organisasi setelah menerapkan suatu sistem informasi. Aspek manfaat bersih seperti perluasan jangkauan sistem, efisiensi biaya operasional, kemudahan pencairan informasi, efisiensi waktu kerja. Hasil penelitian pada dimensi manfaat bersih (*net benefits*) menunjukkan bahwa penerapan SIPD RI dalam penerbitan SP2D *Online* gaji ASN telah memberikan manfaat nyata, meskipun belum sepenuhnya optimal pada seluruh aspek. Pada aspek perluasan jangkauan sistem, SIPD RI dinilai mampu memperluas akses dan fleksibilitas layanan karena berbasis web dan dapat diakses lintas perangkat serta lokasi. Kondisi ini memperkuat integrasi proses kerja antarunit dan memungkinkan pengawasan serta pengendalian yang lebih baik melalui pengaturan hak akses pengguna. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Gilbert et al., 2004) yang menyatakan bahwa perluasan jangkauan sistem tercermin dari kemampuan sistem dalam mendukung keterhubungan lintas unit kerja dan memperluas cakupan layanan organisasi. Selain itu, rencana pengembangan fitur tanda tangan elektronik oleh Kemendagri menunjukkan adanya potensi peningkatan jangkauan sistem di masa depan, khususnya dalam mendukung fleksibilitas persetujuan SP2D oleh Kuasa BUD tanpa keterikatan lokasi fisik. Namun demikian, manfaat SIPD RI dari sisi efisiensi biaya operasional belum sepenuhnya dirasakan. Meskipun sistem tidak memungut biaya penggunaan aplikasi dan secara konseptual berpotensi mendukung penerapan *paperless*, praktik di lapangan menunjukkan bahwa proses administrasi masih sangat bergantung pada dokumen fisik. Berkas SPM dan SP2D tetap dicetak dan digunakan sebagai bagian dari prosedur verifikasi dan arsip internal.

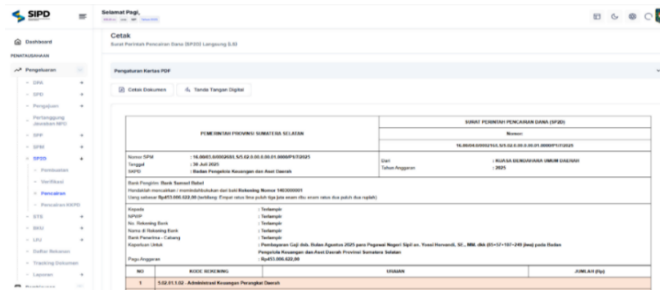


**Gambar 6. Tampilan Berkas SPM Telah Ditandatangani
Oleh Staf, Kasubbid, dan Kabid**
Sumber: Dokumentasi Oleh Penulis (2025)

Gambar 6. merupakan berkas SPM yang diterima oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian sudah melalui proses verifikasi pemeriksaan manual. Staf terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dan ketepatan dokumen yang dilampirkan dalam SPM. Jika ada kekurangan, SPM dikembalikan ke OPD untuk diperbaiki. Namun apabila seluruh dokumen sudah benar, Staf memberikan paraf sebagai tanda bahwa verifikasi awal telah selesai. Setelah itu, SPM diteruskan kepada Kepala Sub Bidang Perbendaharaan untuk diparaf sebagai bentuk pengawasan atas hasil pemeriksaan sebelumnya. Tahap terakhir, dokumen diverifikasi oleh Kepala Bidang Perbendaharaan yang memastikan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi sehingga SPM dapat dinyatakan sudah sesuai.

Gambar 7. merupakan proses penerbitan SP2D *Online* pada SIPD RI dimulai dari pembuatan SP2D oleh operator berdasarkan SPM yang diajukan OPD. Selanjutnya dilakukan verifikasi SP2D dan verifikasi

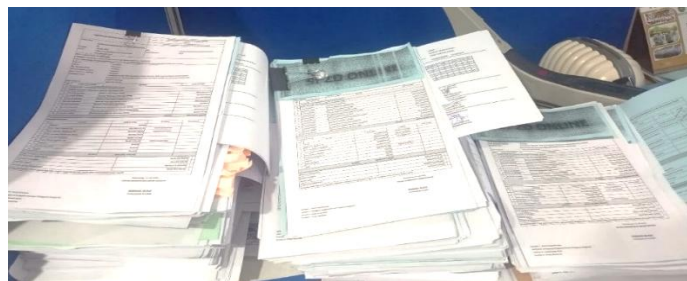
pencairan dalam sistem SIPD RI. Setelah SP2D diterbitkan, SIPD RI secara otomatis mengirimkan instruksi pencairan kepada Bank Sumsel Babel. Bank kemudian mendebet saldo RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) sesuai jumlah yang tercantum dalam SP2D, dan selanjutnya mentransfer dana langsung ke rekening penerima. Hasil transaksi tersebut tercatat dalam register SP2D di SIPD RI sebagai bukti realisasi anggaran daerah.



Gambar 7. Template SP2D Online Yang Telah Terbit di SIPD RI

Sumber: Dokumentasi Oleh Penulis (2025)

Gambar 8. merupakan berkas SP2D Online yang telah dicetak kemudian disatukan dengan dokumen-dokumen yang lain dari masing-masing OPD seperti (SPP-LS Gaji, Rincian SPP-LS Gaji, SPTJM PA, Surat Pernyataan PA bahwa pembayaran langsung akan digunakan sesuai dengan peruntukannya, Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD, Daftar Transfer Potongan JKK JKM, Bukti Pembuatan Kode Billing, Daftar Gaji Pegawai). Hal ini sebagai bukti lampiran bahwasannya sudah dilakukan transfer gaji ASN melalui SIPD RI.



Gambar 8. Berkas SP2D Online Yang Telah Dicitak

Sumber: Dokumentasi Oleh Penulis (2025)

Kondisi ini mengindikasikan bahwa efisiensi biaya, khususnya penghematan kertas belum tercapai secara optimal. Hal tersebut sejalan dengan pandangan (Gilbert et al., 2004) bahwa manfaat sistem informasi baru dapat tercapai secara maksimal apabila didukung oleh perubahan prosedur kerja dan kesiapan organisasi, bukan hanya dari sisi teknologi. Pada aspek kemudahan pencarian informasi, SIPD RI dinilai mampu memberikan manfaat yang cukup baik. Sistem menyediakan data terkait gaji ASN, kode rekening, potongan belanja, hingga status transaksi secara terintegrasi, sehingga pengguna tidak lagi sepenuhnya bergantung pada permintaan data manual ke OPD. Kemudahan ini mempercepat proses pengecekan dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan efektivitas kerja operator. Temuan ini selaras dengan (Scott et al., 2009) yang menekankan bahwa kemudahan akses dan kecepatan memperoleh informasi merupakan indikator penting dari manfaat sistem informasi bagi pengguna. Meski demikian, kualitas dan akurasi informasi tetap sangat bergantung pada ketelitian OPD dalam melakukan input data.

Manfaat paling menonjol dari penerapan SIPD RI terlihat pada aspek efisiensi waktu kerja. Integrasi antara SIPD RI dan sistem Bank Sumsel Babel memungkinkan proses pencairan gaji dilakukan secara terjadwal dan otomatis, bahkan pada hari libur. Tahapan kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pembuatan daftar pengujian yang dilakukan oleh operator Perbendaharaan dan input ulang data oleh pihak Bank Sumsel Babel, kini dapat diminimalkan. Kondisi ini secara nyata mempercepat proses transfer dana ke rekening pegawai dan meningkatkan produktivitas kerja, khususnya bagi operator Perbendaharaan dan pihak Bank Sumsel Babel. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Perkasa, 2025) yang menunjukkan bahwa transaksi pengadaan barang di Kantor DPRD Kota Palembang telah

sepenuhnya dilakukan secara digital melalui platform yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mengintegrasikan instansi pemerintah dengan penyedia barang dan jasa. Penerapan platform digital tersebut memungkinkan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan tanpa melalui tahapan penawaran dan kontrak secara manual satu per satu, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja organisasi. Temuan ini mendukung konsep manfaat bersih menurut (Gilbert et al., 2004), bahwa sistem informasi yang terintegrasi mampu memberikan penghematan waktu dan meningkatkan efisiensi proses operasional organisasi. Namun, efisiensi waktu kerja tersebut belum sepenuhnya merata. Pada kondisi tertentu, seperti ketika terjadi ketidaksesuaian data atau pencairan gaji bertepatan dengan hari libur, keterbatasan akses sistem di pihak Bank Sumsel Babel masih mengharuskan kehadiran fisik petugas di kantor. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat efisiensi waktu yang dihasilkan SIPD RI masih bergantung pada kesiapan infrastruktur dan akses sistem dari pihak Bank Sumsel Babel. Dapat disimpulkan dimensi manfaat bersih menunjukkan bahwa SIPD RI telah memberikan kontribusi positif dalam memperluas jangkauan layanan, mempermudah pencarian informasi, dan meningkatkan efisiensi waktu kerja dalam penerbitan SP2D *Online* gaji ASN. Namun, manfaat dari sisi efisiensi biaya operasional serta optimalisasi fleksibilitas lintas instansi masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Dengan demikian, meskipun SIPD RI telah menghasilkan manfaat yang sangat baik, penguatan dukungan infrastruktur, penyederhanaan prosedur administratif, dan percepatan pengembangan fitur tanda tangan elektronik menjadi faktor penting supaya manfaat sistem dapat dirasakan secara lebih optimal dan menyeluruh oleh para pengguna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003), dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam penerbitan SP2D *Online* gaji ASN di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan secara umum telah menunjukkan tingkat kesuksesan yang baik. SIPD RI telah berfungsi sebagai sistem utama yang mendukung digitalisasi tata kelola keuangan daerah, khususnya pada pencairan gaji ASN, melalui integrasi proses, percepatan alur kerja, serta peningkatan efisiensi operasional.

Kesuksesan tersebut tercermin dari kemampuan sistem dalam mendukung kebutuhan kerja pengguna secara berkelanjutan, baik dari sisi kinerja teknis, penyediaan informasi, layanan pengelolaan sistem, maupun tingkat pemanfaatan dan kepuasan pengguna. SIPD RI tidak hanya digunakan secara konsisten karena dorongan regulasi, tetapi juga karena telah menjadi bagian yang penting dari proses kerja rutin dalam pengelolaan gaji ASN. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mencapai tingkat penerimaan yang tinggi dan berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa kesuksesan SIPD RI belum sepenuhnya bersifat optimal. Kinerja sistem masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kualitas jaringan pada masing-masing OPD menjadi faktor utama agar proses input data ID Billing dapat berjalan lancar dan akurat. Ketika konektivitas jaringan tidak stabil, proses penginputan dan sinkronisasi data berpotensi terganggu, yang kemudian memengaruhi keandalan sistem. Di sisi lain, implementasi SIPD RI juga masih bergantung pada aplikasi perpajakan kementerian keuangan. Ketergantungan ini menyebabkan kinerja SIPD RI tidak sepenuhnya dapat dikendalikan secara internal, karena gangguan pada aplikasi perpajakan kementerian keuangan dapat menunda proses pencairan gaji. Dengan demikian, kesuksesan penerapan SIPD RI dalam penerbitan SP2D *Online* gaji ASN tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan teknis sistem, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, kualitas integrasi antarsistem, serta dukungan lingkungan implementasi yang menunjang keberlangsungan operasional sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Y., Umrah, S., & Husen, M. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada BPKAD Bidang Anggaran Kabupaten Raja Ampat. *Al-Khidmah : Jurnal Pengabdian Dan*

- Pendampingan Masyarakat*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.47945/al-khidmah.v3i1.1460>
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 15–29. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630>
- Candra, E. (2024). Analisis Keberhasilan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dengan Model Kesuksesan DeLone and McLean Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(5), 546–557.
- Chinda Aqhni Adisi, & Abdul Sadad. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150–164. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.581>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Fauzan Alfarishi, A., & Hartati, S. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi Dan Sistem Informasi (Eksistensi)*, 13(1), 2085–2401. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14062597>
- Fogwill, M., & Manataki, A. (2024). Interactive Data Comics For Communicating Medical Data To The General Public: A Study of Engagement and Ease of understanding. *Computers and Graphics (Pergamon)*, 124(May), 104055. <https://doi.org/10.1016/j.cag.2024.104055>
- Gilbert, D., Balestrini, P., & Littleboy, D. (2004). Barriers and Benefits In The Adoption of E-Government. *International Journal of Public Sector Management*, 17(4), 286–301. <https://doi.org/10.1108/09513550410539794>
- Hukmi, W., & Rahayu, R. (2023). Analisis the Update D&M IS Success Model Pada Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kota Sawahlunto. 5, 913–919. <https://doi.org/10.37034/inf.v5i3.635>
- Junaidi, Rizky Ghoffar Ismail, Dwi Mirani, E. (2022). *Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 10- Nomor 2, November 2022, (Hlm 170-184) Kinerja Implementasi Kebijakan Pengelolaan BUMDES Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Jurnal Agregasi Jurnal Aksi Reformasi*. 10(November), 170–185.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). SP2D Online Diluncurkan Langkah Wujudkan Keuangan Daerah Yang Lebih Transparan. KPK.
- Kumalasari, N. I., & Fanida, E. H. (2024). Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi Pada Efektivitas Penggunaan Platform SIPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta). *Publika*, 381–394. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p381-394>
- Manoe, D. S., Koten, Y., & Rozady, M. P. N. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Sikka. *Jurnal in Create (Inovasi Dan Kreasi Dalam Teknologi Informasi)*, 9(1), 19–26.
- Moh. Bayu Naufal Ghinaldi. (2025). *Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu)*. 167–186.
- Nelson, R. R., Todd, P. A., & Wixom, B. H. (2005). Antecedents of Information and System Quality: An Empirical Examination Within The Context of Data Warehousing. *Journal of Management Information Systems*, 21(4), 199–235. <https://doi.org/10.1080/07421222.2005.11045823>
- Nuryana. (2025). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung*. 10(2), 356–383.
- Perkasa, A. (2025). *Analisis Digital Maturity Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang*. 10(4), 755–778.
- Pitt, L. F., Watson, R. T., & Kavan, C. B. (1995). Service quality: A Measure of Information Systems Effectiveness. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 19(2), 173–185. <https://doi.org/10.2307/249687>
- Rafli, M., Athallah, N., Malang, A. K., Timur, P. J., Studi, P., & Publik, K. (2023). *Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan*

Daerah Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

- Scott, M., Delone, W. H., & Golden, W. (2009). Understanding Net Benefits: A Citizen-Based Perspective On Egovernment Success. *ICIS 2009 Proceedings - Thirtieth International Conference on Information Systems*.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2025). Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208.
- Wahyudi, K. P., Johannes, A. W., Sinurat, M., & Romarina, A. (2024). Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Gianyar. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 11(1), 27–38. <https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4381>